

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Amin, R, 2020, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Andy Sofyan & Abdul Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu pengantar*, Prenada Media, Jakarta.
- Alex Hirschfield and Kate Bowers, 2001, *Mapping and Analysing Crime Data: lesson from research and Practice*, Taylor & Francis, London.
- Atmasasmita, Romli, 1989, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian: Dalam Praktek Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta.
- Benjamin J. Goold, 2004, *CCTV and policing: Public area surveillance and police practices in Britain*, Oxford University Press, New York.
- Brownsword, Roger, 2017, *Law, Regulation, and technology*, Oxford University Press, Oxford.
- _____, 2019, *Law, Technology and society: Reimagining the regulatory Environment*, Routledge 2 Park Square, New York.
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalah Guna Narkotika*, ed. R. Nofrial, Deepublish, Yogyakarta.
- Dio Ashar Wicaksana, Siska Trisia dan Kevin D., 2020, *Teknik Pembuktian di Persidangan*, MaPPI FHUI, Jakarta.
- Edy Santoso dan Sukendar, 2020, *Hukum Bisnis: Kumpulan Undang-undang di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Deepublish, Yogyakarta
- Effendi, Tolib, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana: Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Heveman, Roelof H., 2002, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta, Tata Nusa.
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

- Harahap, M. Yahya, 2001, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hidayat, Sabrina, 2020, *Pembuktian Kesalahan: Pertanggungjawaban Pidana Dokter Atas Dugaan Malpraktik Medis*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya.
- Inga Kroener, 2014, *CCTV: A Technology Under the Radar*, Ashgate Publishing Limited, Great Britain.
- Kasiyanto Kasemin, 2015, *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi: Sebuah bunga rampai hasil pengkajian dan pengembangan Teknologi Informasi*, Prenadamedia, Jakarta
- Koulu, Riikka, 2018, *Law, technology and dispute resolution: Privatisation of coercion*, Routledge 2 Park Square, New York
- Makaro, Muhammad Taufik, 2002, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Martin Gill dan Angela Spriggs, 2005, *Assessing the impact of CCTV, Home Office Research, Development and Statistics Directorate*, Leicester.
- Martokusumo, Sudikno, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga rampai hukum pidana: perspektif teoretis dan praktik*, Alumni, Bandung.
- _____, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Prakoso, Djoko, 1998, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1980, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur bandung, Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Simanjuntak, Nikolas, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sadiawati, Diani *et al*, 2015, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*, Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Bandung

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, R., 2007, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suhariyanto, Budi, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.

Vikas Kumar dan Jakob Svensson, 2015, *Promoting Social Change and Democracy Through Information Technology*, IGI Global, Hersey (USA).

Yusro, Muhammad, 2019, *Pengenalan Teknologi CCTV*, Bahan Ajar di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3674)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4150)

Undang undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106)

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Indonesia Tahun 2018 Nomor 92 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216)

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: 08/KMA/1984, Nomor: M.02-KP.10.06 Th.1984, Nomor: KEP-076/JA/3/1984, No Pol: KEP/04/III/1984 Tentang Peningkatan Koordinasi Dalam Penanganan Perkara Pidana, Bab III Permasalahan.

Mahkamah Agung RI, "Himpunan Surat Petunjuk Mahkamah Agung RI dan Instruksi Mahkamah Agung RI dari Tahun 1951 s.d. 1994", Jakarta, Mahkamah Agung RI, 1999

C. Jurnal, Hasil Penelitian dan Makalah

- Aji, Ahmad M, "Pemberantasan Tindak Pidana di Indonesia: Perspektif Teori Hukum," *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol. 53, No. 9, 2018.
- Alexandrie, Gustav, "Surveillance cameras and crime: a review of randomized and natural experiments," *Routledge Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- AY, Ofori, "Digital Forensics Investigation Jurisprudence: Issues of Admissibility of Digital Evidence," *Journal of Forensic, Legal & Investigative Sciences*, Vol. 6, No. 1, 2020.
- Chandranegara, Ibnu Sina, "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 3, 2019.
- Creswell, John W., Michael D. Fetters, and Nataliya V. Ivankova. "Designing a mixed methods study in primary care." *The Annals of Family Medicine* 2.1, 2004.
- Darmabrata, Wahyono, "Perbandingan dan Pendidikan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 30, No. 4, 2000.
- Didik Endro Purwoleksono et al, "Kedudukan Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Perundang-Undangan di Indonesia," *Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 2014.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, "Mengurai Pengaturan Penyadapan dalam Rancangan KUHAP," *Jurnal Teropong MaPPI FHUI*, Vol. 1, 2014.
- Insan Firdaus, "Harmonisasi Undang-undang Narkotika dengan Undang-undang tentang Pemasarakatan terkait Rehabilitasi Narkotika Warga Binaan Pemasarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, 2021.
- Kemitraan, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, IDLO, Kingdom of the Netherlands, "Perbandingan prosedur (hukum acara) pengelolaan bukti elektronik Belanda-Amerika Serikat-Inggris," 2020.
- Kemitraan, Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan, IDLO, Kingdom of the Netherlands, "Pengaturan Tentang Perolehan, Pemeriksaan, Dan Pengelolaan Bukti Elektronik (Electronic Evidence)," *Bukti Elektronik Di Indonesia*, 2020.
- Laela Fakhriah, Efa, "Kedudukan Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Makalah disampaikan pada Seminar Terbatas kerjasama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan Setelah Berlakunya

UU No. 11 Tahun 2008”, tanggal 25 November 2009, Grand Pasundan Hotel, Bandung

Makarim, Edmond, “Keotentikan Dokumen Publik Elektronik dalam Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik,” *Hukum dan Pembangunan*, 2015.

Manan, Abdul, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013.

Marbun, Rocky, “Implementasi Teori Strategi Ilmu Sosial Dan Hermeneutika Hukum Dalam Rangka Melampaui Pasal 86 Kuhap,” *Palar | Pakuan Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2017.

Muhajir, Akmal, 2016, “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Tindak Pidana Akses Ilegal”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Nomor Tahun Tentang Hukum Acara Pidana

National Institute of Justice, “Electronic crime scene investigation guide: A guide for first responders,” United States Department of Justice Office of Justice, 2001.

Office of Justice Programs, “CCTV: Constant Cameras Track Violators,” *NIJ Journal*, No. 249, 2003.

Okkita Rizan dan Hamidah Hamidah, “Rancangan Aplikasi Monitoring Kamera CCTV Untuk Perangkat Mobile Berbasis Android,” *Teknologi Informatika dan Komputer*, Vol. 3, 2016.

Prasetyo, Eko Surya, Y.A. Triana Ohoiwutun, dan Halif Halif, “Implikasi Yuridis Kebijakan Formulasi Alat Bukti Elektronik,” *Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2018.

Pura Justitia, Dimas Aria, 2020, “Eksistensi Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data dalam Pembuktian perkara Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Hukum Litigasi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017.

Ronny F, Ahkam, 2019, “Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Didapatkan Dengan Cara Penyadapan Dalam Hukum Acara Pidana”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Rusyadi, I., “Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 5, No. 2, 2016.

Suhariyanto, Budi, “Pelenturan Hukum Dalam Putusan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Jaksa Penuntut Umum,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 2, 2015.

The U.S. Department of Homeland Security, 2013, CCTV Technology Handbook: System Assessment and Validation for Emergency Responders (SAVER), No. July, *Space and Naval Warfare Systems Center Atlantic*, New York.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 perihal Pengujian Undang-Undang oleh Drs. Setya Novanto, Tanggal 22 Juni 2016

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST perihal Pembunuhan Berencana perkara Jessica Kumala Wongso 24 Oktober 2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tentang PUU oleh Choky Risda Ramadhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian Undang-Undang oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Tanggal 8 Agustus 2011.

E. Internet

Akhmad Wiyagus, “Analisa dan Pengelolaan Barang Bukti (dalam kajian teoritis dan kerangka Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang pengelolaan barang bukti” <https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/labuksi/02-Analisa-Dirtipidkor-oleh-Kepolisian-RI.pdf>. Diakses 20 September 2021

Athika Rahma, “Keren, Kamu Bisa Pantau 6.000 Kamera CCTV di Jakarta dengan Cara Ini” <https://www.liputan6.com/tekno/read/3971745/keren-kamu-bisa-pantau-6000-kamera-cctv-di-jakarta-dengan-cara-ini>, diakses 11 November 2020.

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia, KBBI Daring. “alat bukti”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/alat%20bukti>, Diakses 27 Maret 2021

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia, KBBI Daring, “sangka”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tersangka>, diakses 9 Februari 2021

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia, KBBI Daring, “perbandingan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbandingan>, diakses 12 Juli 2021

Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Republik Indonesia, KBBI Daring, “harmonisasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonisasi>, diakses 4 September 2021

Denny, “Sebentar Lagi, Jumlah CCTV di Surabaya Capai 1.800 Unit”, <https://www.indosecuritysistem.com/read/cctv/2018/02/05/2630/sebentar-lagi-jumlah-cctv-di-surabaya-capai-1-800-unit>, diakses 11 November 2020

Humza Aamir, “Report finds the US has the largest number of surveillance cameras per person in the world”, <https://www.techspot.com/news/83061-report-finds-us-has-largest-number-surveillance-cameras.html> diakses 11 November 2020

Humza Aamir, “Report finds the US has the largest number of surveillance cameras per person in the world”, <https://www.techspot.com/news/83061-report-finds-us-has-largest-number-surveillance-cameras.html> diakses 11 November 2020.

Hidayat, Rofiq, “Bukti Elektronik dan Prosedur Perolehan Perlu Diatur dalam Sistem Peradilan,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt580889815831f/bukti-elektronik-dan-prosedur-perolehan-perlu-diatur-dalam-sistem-peradilan>. diakses 20 September 2021

Indonesia Corruption Watch, “Bukti CCTV: Membandingkan kasus Novel dengan kasus lain yang melibatkan bukti rekaman CCTV” <https://antikorupsi.org/id/galeri/bukti-cctv>, diakses 5 Desember 2021

Institute for Criminal Justice Reform, “Perbandingan Alat Bukti dalam KUHAP dan Rancangan KUHAP”, <https://icjr.or.id/perbandingan-alat-bukti-dalam-kuhap-dan-rancangan-kuhap-2/>, diakses 22 September 2021

Lowell Bradford, 2019, "How Video Surveillance Technology Has Evolved – CCTV Technology", <https://www.surveillance-video.com/blog/a-history-of-cctv-technology-how-video-surveillance-technology-has-evolved.html/>, diakses 18 Mei 2021

Mur, “10 Persen CCTV di Kota Bandung Tidak Aktif”, <https://www.radarbandung.id/2019/08/14/10-persen-cctv-di-kota-bandung-tidak-aktif/>, diakses 11 November 2020

Motorway Cameras in England, <http://www.motorwaycameras.co.uk>, diakses 30 Mei 2021

Rowena Coetsee, Bay Area News Group. "New surveillance cameras doing their job, Antioch's top cop says", <https://www.eastbaytimes.com/2017/08/11/new-surveillance-cameras-doing-their-job-antiochs-top-cop-says/>, diakses 30 Mei 2021